



# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga dapat melakukan penyusunan Laporan Bulanan Juni Kegiatan Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah. Laporan Bulanan Juni ini dimaksudkan untuk mempersiapkan bahan Penyebar Luasan Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mengoptimalkan upaya melaksanakan penyusunan, koordinasi, dan fasilitasi infrastruktur daerah, pengelolaan data dan penyebarluasan informasi dana alokasi khusus sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/ 2020. Laporan Bulanan Juni dibuat sebagai bentuk penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan terhadap rangkaian tahunan Kegiatan Penyebar Luasan Infrastruktur Daerah, Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah.

Sistematika Laporan ini terdiri atas latar belakang pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan kegiatan serta kesimpulan dan saran kegiatan.

Terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa data, informasi, dan diskusi terkait kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembinaan Bidang Infrastruktur sehingga Laporan Bulanan Juni ini selesai sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2024

**Aldi Nur Islami Syahirul Alam S.Kom**





# DAFTAR ISI

1	BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1	LATAR BELAKANG.....	3
1.2	DASAR HUKUM .....	4
1.3	TUJUAN .....	5
1.4	LINGKUP KEGIATAN .....	5
1.5	WAKTU & TEMPAT .....	5
	BAB 2 ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN .....	6
1.6	PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN .....	6
1.6.1	Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome .....	6
1.6.2	Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi.....	7
1.6.3	Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat .....	8
1.6.4	Perbaikan Fitur.....	9
1.6.5	Penyesuaian Data dan Tampilan.....	10
1.6.6	Permintaan Data dan Dokumen.....	11
	BAB 3 PENUTUP .....	13
1.7	KESIMPULAN .....	13
1.8	SARAN .....	13
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	14



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum merupakan pendorong bagi terlaksananya pembangunan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam penyusunan strategi, kebijakan umum, proyek strategis, program Kementerian/Lembaga dalam pembangunan Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan 9 misi pembangunan nasional yang di sebut dengan *Nawacita* tahap Kedua.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian PUPR memiliki bagian dalam mendukung terlaksananya **misi ke-2** dalam *Nawacita* tahap Kedua yakni, Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah sebagai *techno structure* dan dapat berkoordinasi dengan eksternal serta membuat kebijakan terkait infrastruktur daerah. PFID merupakan organisasi Eselon II dibawah Sekretariat Jenderal dan memiliki fungsi dalam memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa infrastruktur daerah. Berdasarkan uraian diatas posisi Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah dalam mendukung sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan **sasaran strategis poin 5** yakni, **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**. Dalam organisasi ini terdiri dari 4 bidang dan 1





sub bidang yang masing-masing menangani pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perumahan dan Permukiman dan terdapat bidang perencanaan yang fungsinya melaksanakan penyusunan, koordinasi, dan pembinaan teknis keterpaduan perencanaan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah, pengolahan dan dan penyebaran informasi.

Laporan Bulanan Konsultan Individu Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dalam hal ini dilakukan oleh Tenaga Ahli Muda Perencana dalam melaksanakan tugasnya mendukung Kegiatan Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah.

## 1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan program/kegiatan pada dasarnya harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang dapat dipatuhi dan berlandaskan hukum (berpayung hukum) agar program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pekerjaan ini diantaranya, yaitu :

1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN;
3. UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
6. UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN);
7. UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN TA.2021;
9. UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. PP nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. PP nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
12. PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. PP nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
14. PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;





16. Permen PUPR No.08/PRT/M/2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur PUPR.
17. Perpres RI nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
18. Perpres RI nomor 86 tahun 2021 Tentang RKP Tahun 2020;
19. Perpres RI nomor 15 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2024;
20. Permen PU nomor 01/PRT/M/2014 Tentang SPM Bidang PU dan PR;
21. Permen PERA nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang SPM Bidang PERA Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

### 1.3 TUJUAN

Laporan Bulanan disusun sebagai salah satu keluaran, sesuai kerangka acuan kerja, dari kegiatan swakelola Penyebar Luasan Informasi perencanaan infrastruktur daerah.

Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perencanaan yang memadukan 3 (tiga) bidang yaitu jalan, sumber daya air dan permukiman. Laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan selama bulan berkenaan.

### 1.4 LINGKUP KEGIATAN

Laporan Bulanan Juni yang disusun ini memiliki ruang lingkup atau lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Muda selama bulan Juni yaitu :

1. Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome
2. Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi
3. Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat
4. Perbaikan Fitur
5. Penyesuaian Data dan Tampilan
6. Permintaan Data dan Dokumen

### 1.5 WAKTU & TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2024 untuk mengetahui evaluasi dukungan yang dilakukan.





## BAB 2 ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1.6 PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Tahapan pengelolaan DAK terdiri dari perencanaan, pemrograman, pembinaan pengawasan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang meliputi bidang irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah terdiri atas Bidang Perencanaan Fasilitas Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Air Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman.

#### 1.6.1 Pembuatan Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome

Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi hasil (Immediate Outcome) yang berkaitan dengan bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan, telah dilakukan langkah-langkah esensial dalam proses pembuatan dan implementasi fitur penginputan data yang bertujuan untuk mengakomodasi dan mempermudah pelaporan serta analisis dampak yang cepat dan akurat.





Langkah awal melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan informasi terkait Immediate Outcome di bidang yang dimaksud. Dengan merinci berbagai jenis hasil segera yang diharapkan, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, peningkatan sanitasi, atau perkembangan perumahan, tahap analisis ini memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan fitur yang relevan dan efektif.

Fitur penginputan data ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan pengalaman pengguna yang mudah. Formulir yang disediakan menyesuaikan dengan jenis data yang diinputkan, meminimalkan potensi kesalahan dan memastikan integritas informasi. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengunggahan dokumen pendukung.

Data yang diinputkan melalui fitur ini disimpan dalam pangkalan data terpusat yang terjamin keamanannya. Proses penginputan dan penyimpanan dilakukan dengan standar keamanan tinggi, mengamankan data dari potensi ancaman atau manipulasi.

Untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang diinputkan, fitur ini juga dilengkapi dengan mekanisme validasi dan verifikasi. Tim verifikasi akan melakukan pengujian terhadap data yang diinputkan, serta memverifikasi keabsahan perubahan Immediate Outcome yang dilaporkan.

#### **1.6.2 Penambahan Fitur Rekapitulasi IO (Air Minum, sanitasi dan perumahan & permukiman) dan Total Rekapitulasi Sanitasi**

Pada bulan Juni 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan penambahan fitur penting dalam sistem informasi pengelolaan proyek infrastruktur. Fitur baru ini adalah Rekapitulasi Immediate Outcome (IO) yang mencakup bidang Air Minum, Sanitasi, serta Perumahan dan Permukiman. Penambahan fitur ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak langsung dari berbagai proyek infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan. Dengan adanya rekapitulasi IO, data mengenai akses air minum, kondisi sanitasi, dan status perumahan serta permukiman dapat diakses secara lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.



Fitur Rekapitulasi IO bidang Air Minum menyediakan informasi rinci tentang peningkatan akses dan kualitas air minum di berbagai daerah. Data yang terhimpun meliputi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih baru, kualitas air yang disediakan, serta efisiensi distribusi air. Fitur ini memungkinkan pemantauan lebih akurat terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan akses air bersih, serta membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di sektor air minum.

Sementara itu, fitur Rekapitulasi IO bidang Sanitasi fokus pada peningkatan kualitas dan akses sanitasi di permukiman penduduk. Data yang dihimpun mencakup jumlah fasilitas sanitasi baru yang dibangun, peningkatan akses sanitasi layak bagi rumah tangga, serta pengelolaan limbah yang lebih efisien. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek sanitasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Fitur ini juga mendukung evaluasi program-program sanitasi dan membantu dalam perencanaan ke depan untuk meningkatkan kondisi sanitasi di berbagai daerah.

Selain itu, penambahan fitur Total Rekapitulasi Sanitasi memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh kegiatan sanitasi yang telah dilaksanakan. Fitur ini mencakup data kumulatif mengenai pembangunan fasilitas sanitasi, peningkatan akses, serta perbaikan kualitas layanan sanitasi di seluruh Indonesia. Dengan fitur ini, Kementerian PUPR dapat dengan mudah melihat perkembangan dan pencapaian di sektor sanitasi, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa semua proyek sanitasi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penambahan fitur-fitur ini merupakan bagian dari komitmen PUPR untuk terus meningkatkan pengelolaan dan kualitas infrastruktur, guna mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

### **1.6.3 Pembuatan akun BAPPENAS, ATR dan BAPPENAS PERKIM & Pembuatan akun BPPW Sumatera Barat**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil menyelesaikan proses pembuatan akun BAPPENAS, ATR, dan BAPPENAS PERKIM untuk menu "Bidang Perumahan - Rekapitulasi Readiness Criteria" Tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk





meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola dan memantau kesiapan proyek perumahan. Akun-akun ini memungkinkan pemangku kepentingan dari BAPPENAS, ATR, dan BAPPENAS PERKIM untuk mengakses data dan informasi terkait kriteria kesiapan proyek perumahan, termasuk status persiapan lahan, perizinan, anggaran, serta kesiapan teknis dan operasional. Dengan akses ini, koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik, dan pemantauan serta evaluasi proyek dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Barat, PUPR juga telah menyelesaikan pembuatan akun untuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat. Akun ini dirancang untuk mendukung BPPW dalam mengakses berbagai sistem informasi yang relevan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek infrastruktur. Dengan adanya akun ini, BPPW Sumatera Barat dapat mengunggah laporan kemajuan proyek, mengajukan permohonan bantuan teknis, serta menerima pembaruan dan instruksi dari pemerintah pusat dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pembuatan akun-akun ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga, diharapkan proyek-proyek yang direncanakan dapat terlaksana dengan lebih baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

#### **1.6.4 Perbaikan Fitur**

Pada bulan Juni 2024, telah dilakukan perbaikan pada fitur rekapitulasi dan unduhan Immediate Outcome (IO) di bidang Air Minum. Perbaikan ini mencakup peningkatan akurasi data rekapitulasi dan optimalisasi fungsi unduhan sehingga data terkait pencapaian dan dampak proyek air minum kini dapat diakses dan diunduh dengan lebih mudah dan lengkap. Dengan adanya pembaruan ini, pengguna dapat memperoleh laporan yang lebih akurat dan

Pada bulan yang sama, telah melaksanakan perbaikan penting pada fitur upload dokumen Immediate Outcome (IO) yang sebelumnya mengalami kendala teknis, sehingga dokumen tidak dapat diunggah secara langsung. Perbaikan ini melibatkan pembaruan sistem pengunggahan dokumen dan peningkatan stabilitas platform untuk memastikan proses unggah dapat berjalan lancar dan efisien. Dengan adanya perbaikan ini, pengguna kini dapat mengunggah dokumen IO tanpa hambatan, yang akan memudahkan dalam penyampaian laporan dan dokumentasi terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada fitur Outcome IO di bidang jalan, di mana data yang ditampilkan kini lebih akurat dan terperinci. Fitur ini mencakup informasi mengenai peningkatan kondisi jalan, jumlah proyek yang telah diselesaikan, dan dampak langsung dari proyek-proyek tersebut terhadap mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan data yang lebih transparan dan komprehensif, pemerintah pusat dan daerah dapat lebih mudah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan jalan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengelolaan proyek infrastruktur jalan.

Khusus untuk Kabupaten Karo, perbaikan fitur juga mencakup penambahan data mengenai kecepatan rata-rata kendaraan. Informasi ini sangat penting untuk menilai kinerja infrastruktur jalan di daerah tersebut dan dampaknya terhadap efisiensi transportasi. Dengan data kecepatan rata-rata yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik-titik kemacetan dan area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Ini merupakan bagian dari upaya PUPR untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam evaluasi terhadap berkas berita acara proyek infrastruktur PUPR, ditemukan





persyaratan teknis dan administratif. Kami yakin bahwa persiapan yang kami lakukan akan memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi proyek-proyek infrastruktur PUPR yang tercakup dalam DAK tersebut, serta tetap mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Dalam konteks permintaan dokumen rekapitulasi ceklis Immediate Output Kecepatan Jalan, kami telah melakukan proses pengumpulan dan analisis data terkait. Dokumen ini penting untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang dilakukan dalam proyek infrastruktur PUPR. Pengumpulan data meliputi pencatatan kecepatan jalan saat sebelum dan setelah intervensi, serta analisis dampak terhadap lalu lintas dan pengguna jalan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi transportasi serta keamanan pengguna jalan, sesuai dengan standar teknis dan keselamatan yang berlaku dalam bidang PUPR.

Dalam respons terhadap permintaan data mengenai Output 2019 - 2024 dan Outcome dari kelima bidang dalam bidang PUPR, kami telah menyusun laporan yang mencakup analisis mendalam terhadap capaian proyek-proyek infrastruktur selama periode tersebut. Data output mencakup pencapaian fisik seperti kilometer jalan yang dibangun, jumlah jembatan yang direnovasi, dan kapasitas air yang dibangun. Sementara itu, outcome dievaluasi berdasarkan dampak sosial-ekonomi seperti peningkatan aksesibilitas, pengurangan waktu perjalanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi energi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi proyek PUPR terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



# BAB 3 PENUTUP

## 1.7 KESIMPULAN

Dari hasil analisis pelaksanaan kegiatan infrastruktur PUPR, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mengikuti proses yang terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek tersebut untuk mendukung prioritas nasional, seperti bidang air minum, sanitasi, dan perumahan. Fitur Rekapitulasi Immediate Outcome juga memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan pemantauan terhadap dampak sosial-ekonomi proyek, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Perbaikan fitur-fitur seperti validasi data yang lebih ketat dan penyajian informasi yang lebih terinci akan terus diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas data yang dihasilkan.

## 1.8 SARAN

Untuk saran ke depan, disarankan untuk terus meningkatkan keefektifan dan efisiensi sistem Rekapitulasi Immediate Outcome, termasuk dengan mempertimbangkan integrasi teknologi yang lebih maju untuk pemantauan secara real-time. Selain itu, peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas SDM terkait dengan penggunaan sistem ini juga perlu diprioritaskan, agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengoptimalkan manfaat dari fitur-fitur yang disediakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PUPR dapat terus berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Kertas HVS	100	lembar
2	Kertas Beras	100	lembar
3	Kertas Kuning	100	lembar
4	Kertas Merah	100	lembar

**Total Biaya** : Rp. 1.000.000  
**Total Jumlah** : 400 lembar

No	Nama	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga				
1	Kertas HVS	100	lembar	10.000	1.000.000				
2	Kertas Beras	100	lembar	10.000	1.000.000				
3	Kertas Kuning	100	lembar	10.000	1.000.000				
4	Kertas Merah	100	lembar	10.000	1.000.000				

[illegible]





No.	Kategori Kegiatan	Tahap Perencanaan / Persiapan		Tahap Pelaksanaan / Pelaksanaan		Batas Waktu / Target Waktu (Bulan)	Status	Keterangan	Kategori Data	Jenis Data	Sumber Data	Kategori Data	Kategori Data	Kategori Data	Kategori Data	Kategori Data	Kategori Data
		Detail	Detail	Detail	Detail												
1	Studi awal	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
2	Penelitian lapangan	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
3	Penelitian lapangan	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
4	Kajian teknis	200	Studi	200	Studi	200	Selesai										
5	Kajian teknis	200	Studi	200	Studi	200	Selesai										
6	Penelitian	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
Pembangunan Infrastruktur Perencanaan Daerah																	
7	Pembangunan infrastruktur regional	200	Studi	200	Studi	200	Selesai										
8	Pembangunan infrastruktur regional	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
9	Pembangunan infrastruktur regional	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										

Pembangunan Infrastruktur Perencanaan Daerah																	
10	Pembangunan infrastruktur regional	200	Studi	200	Studi	200	Selesai										
11	Pembangunan infrastruktur regional	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										
12	Pembangunan infrastruktur regional	1	Studi	1	Studi	200	Selesai										







[illegible]



No.	PILIHAN	REVISI	REVISI	OUTPUT				PENGGANTIAN			
				TAMBAH	BARU	BARU	% LAMBA	TAMBAH	BARU	TAMBAH	BARU
3	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
4	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
5	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
6	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
7	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
8	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	20-Peranginan Jalan Perumahan	10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00
				10,00	10,00	100%	100%	10,00	10,00	10,00	10,00